

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya dan juga tentang masalah pajak. Ditinjau dari sejarahnya, masalah pajak ini sudah ada sejak zaman dahulu kala walaupun pada saat itu belum dinamakan “pajak”, namun masih merupakan pemberian yang bersifat sukarela dari rakyat kepada rajanya. Perkembangan selanjutnya pemberian itu berubah menjadi upeti yang sifat pemberiannya dipaksakan dalam arti bahwa pemberian itu bersifat “wajib” dan ditetapkan secara sepihak oleh Negara. Dengan kata lain “pajak” yang semula merupakan pemberian berubah menjadi pungutan, hal ini adalah wajar karena kebutuhan Negara akan dana semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan Negara yaitu untuk mempertahankan Negara dan melindungi rakyatnya dan untuk melaksanakan pembangunan. Masalah pajak adalah masalah masyarakat, Negara, dan setiap orang yang hidup dalam suatu Negara pasti dan harus berurusan dengan pajak, oleh karena itu masalah pajak adalah masalah seluruh rakyat dalam Negara tersebut (Mardiasmo, 2011: 1).

Hal ini disebabkan karena pajak salah satu elemen penting dari perimaan Negara yang dapat memberikan kontribusi yang cukup besar untuk kelangsungan pemerintahan. Ada 2 sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada Negara yaitu melalui pungutan pajak, dan/atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam Negara (*natural resource*). Disamping pemungutan berbagai macam pajak, pemerintah juga masih melakukan berbagai pemungutan lain, misalnya redistribusi, sumbangan, bea dan cukai.

Definisi pajak menurut S.I. Djajadiningrat yaitu pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah

serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Resmi, 2007: 1).

Pemungutan pajak daerah dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Pemungutan pajak berdasarkan penetapan dilaksanakan dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Sedangkan pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, terhadap Wajib Pajak tersebut dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

Kabupaten Pati merupakan salah satu daerah yang memiliki letak dan potensi daerah yang baik untuk pembangunan. Pembangunan di daerah ini mengalami perkembangan yang pesat dalam segala bidang, perkembangan ini dikarenakan Pendapatan Rata-Rata Daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pada Pendapatan Daerah tersebut. Realisasi pendapatan daerah dari Pendapatan Rata-Rata Daerah tersebut selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dibuktikan dalam Target dan Realisasi Pendapatan Rata-Rata Daerah Tahun 2014-2016.

TABEL 1.1
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN RATA-RATA DAERAH
TAHUN 2014-2016

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN (%)
2014	18.000.000.000	19.787.215.288	109,93
2015	19.000.000.000	20.154.966.230	100,77
2016	20.000.000.000	20.491.182.735	107,85

Sumber: BPKAD Kabupaten Pati, 2017

Salah satu Pajak Daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pati adalah Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). BPHTB yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah

dan/atau bangunan. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi dan badan. Semakin bertambahnya penduduk di Kabupaten Pati maka tiap orang yang sudah memiliki keluarga rata-rata memiliki tanah dan bangunan yang didapatkan secara jual beli, hibah, warisan, hadiah dll. Sebagian besar penduduk tersebut memanfaatkan tanah dan bangunan untuk tempat tinggal dan/atau kegiatan usaha untuk kelangsungan hidup. Realisasi pendapatan daerah dari Pajak BPHTB selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dibuktikan dalam Target dan Realisasi BPHTB Tahun 2014-2016.

TABEL 1.2
TARGET DAN REALISASI BPHTB TAHUN 2014-2016

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN (%)
2014	4.600.000.000	6.843.381.647	148,77
2015	8.000.000.000	10.558.154.460	131,98
2016	6.000.000.000	9.115.045.890	151,92

Sumber: BPKAD Kabupaten Pati, 2017

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat membuktikan bahwa target dan realisasi BPHTB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pemerintah Daerah disini sangat diuntungkan karena semakin banyak pemasukan dari BPHTB. Tetapi disamping itu, Pemerintah Daerah juga menghadapi hambatan dalam pemungutan pajaknya. Pemerintah Daerah menunjuk pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai pelaksana pemungutan pajak BPHTB di Kabupaten Pati.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan Tugas Akhir ini menjelaskan topik tersebut dalam laporan yang disusun dengan judul “Mekanisme Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Atas Pemindahan Hak Pada Perolehan Jual Beli Di BPKAD Kabupaten Pati”.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan pemungutan BPHTB yang meliputi 5 proses.
2. Kendala yang dihadapi BPKAD Kabupaten Pati dalam melaksanakan pemungutan BPHTB.
3. Upaya yang dilakukan BPKAD Kabupaten Pati dalam mengatasi berbagai kendala dalam pemungutan BPHTB.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pemungutan BPHTB yang meliputi 5 proses yaitu: penetapan, pengisian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB, penghitungan pajak terutang, penelitian (verifikasi) SSPD, serta pembayaran.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh BPKAD Kabupaten Pati dalam pemungutan BPHTB.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala dalam pemungutan BPHTB di Kabupaten Pati.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu:

Bagi pembaca supaya menambah wawasan, memperoleh informasi serta dapat memahami tentang pajak daerah khususnya dalam bidang BPHTB mengenai mekanisme pemungutan BPHTB atas pemindahan hak pada perolehan jual beli yang dilaksanakan di BPKAD Kabupaten Pati.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1.4.1 Data Penulisan

- a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya (Sugiyono, 2012:225). Data ini diperoleh ketika melakukan magang di BPKAD Kabupaten Pati. Contoh data primer yang diperoleh: melakukan wawancara kepada kepala bidang PBB-P2 dan BPHTB mengenai hambatan yang dihadapi ketika pelaksanaan pemungutan BPHTB serta cara mengatasi kendala pemungutan BPHTB.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari Biro Statistik, dokumen-dokumen perusahaan atau organisasi, surat kabar dan majalah, ataupun publikasi lainnya. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau orang lain (Sugiyono, 2012:225). Contoh data sekunder yang diperoleh: gambaran umum, serta data-data yang berhubungan dengan BPHTB di BPKAD.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Penulisan Tugas Akhir ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Metode observasi yaitu proses pencatatan perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2013:15). Dalam penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan pengamatan secara langsung kegiatan pelaksanaan dibidang PBB-P2 dan BPHTB pada BPKAD Kabupaten Pati.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo 2013:152) . Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada pihak – pihak yang terkait dengan hal – hal yang dijadikan bahan penulisan ini.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka (atau sering disebut juga studi literatur – literatur review) merupakan sebuah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo 2013:153). Berbagai teori yang diperoleh melalui buku, literatur, dokumen, dan surat-surat yang berhubungan dengan objek penulisan dan topik bahasan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman maka dalam penulisan Tugas Akhir ini terbentuklah sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum

Berisi tentang gambaran BPKAD Kabupaten Pati meliputi sejarah berdiri, lokasi dan wilayah kerja, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, daftar nama pimpinan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, dan kegiatan pelayanan.

Bab III Pembahasan

Pada bab ini membahas tentang BPHTB, pelaksanaan dan pemungutan BPHTB, kendala yang dihadapi BPKAD serta upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi tentang ringkasan dari pembahasan Mekanisme Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Atas Pemindahan Hak Pada Jual Beli di BPKAD Kabupaten Pati.